

PERANAN LEMBAGA KURSUS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

Kasto Munawiharto

Program Studi Akuntansi STIEB Perdanan Mandiri Purwakarta

kastomunawiharto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis kursus yang diselenggarakan di kabupaten Purwakarta dan mengetahui peranan lembaga kursus dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2016 dan berakhir pada bulan September 2016 di empat kecamatan yaitu Kecamatan Purwakarta, Bungursari, Campaka dan Ciseureuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama yang turun lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model interaktif (interaktif model of analisis) dari Miles dan Huberman. Jenis kursus yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta adalah Komputer, mengemudi dan Bahasa Inggris. Upaya yang dilakukan oleh lembaga kursus dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan keringanan biaya (memberikan potongan harga dan mencicil biaya kursus), memperpanjang waktu kursus dengan tidak dipungut biaya tambahan, dan memberikan pilihan sesuai dengan kesibukan peserta kursus dan menyelenggarakan kursus secara gratis.

Kata Kunci : Lembaga Kursus, Pemberdayaan, masyarakat

3. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat.

Priyono (Arisah, 2009) memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik,

ekonomi, psikologi dan lain-lain.

Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang

menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui : (1) pengembangan masyarakat, (2) pengorganisasian masyarakat (Nuryasin 2011).

Pemberdayaan masyarakat selalu mengacu kepada kelompok masyarakat yang berada dilapisan bawah yang karena posisinya itu seringkali menjadi korban dari dinamika pembangunan. Kelompok masyarakat itu menyandang kondisi yang serba lemah dan kekurangan dalam mutu dan taraf hidup, keterampilan, keswadayaan, dan sebagainya. Oleh karena itulah, mereka perlu diberdayakan.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah: Seberapa besar peranan dan pengaruh lembaga kursus dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi dan perkembangan lembaga kursus yang ada di kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh lembaga kursus terhadap UMKM di kabupaten Purwakarta.

Adapun manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penentu kebijakan dalam membina dan mengarahkan lembaga kursus di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan informasi bagi penulis dan para pembaca pada umumnya mengenai lembaga lembaga kursus yang ada di kabupaten purwakarta.
3. Sebagai bahan refensi bagi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai obyek ini.

4. Kajian Literatur Peranan lembaga pembelajaran adalah

suatu usaha dalam proses ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai sebuah bentuk karya nyata dalam sumbangan pembangunan pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan hubungan antara pendidikan dan realitas kehidupan yang mantap dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan peranan pendidikan yang mendasar untuk memanusiakan manusia.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada bangsa sabagai salah satu bentuk pendidikan nonformal (Pasal 13 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan nonformal dapat berperan sebagai pelengkap (complement) terhadap pendidikan formal, yaitu pendidikan nonformal dapat menyajikan mata pelajaran atau kegiatan belajar yang belum termuat dalam kurikulum pendidikan formal.

Penyelenggaraan kursus bahasa Inggris adalah suatu upaya untuk membelajarkan peserta didik dalam penguasaan bahasa Inggris. Hal ini mengandung makna bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode atau strategi yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris membutuhkan pengetahuan pengejaan, tata bahasa, kosa kata, dan kultur. Upaya lembaga kursus bahasa Inggris adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggris sehingga dapat menjawab dan merespon lingkungan pengguna jasanya.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui : (1) pengembangan masyarakat, (2) pengorganisasian masyarakat (Nuryasin 2011).

Pemberdayaan masyarakat selalu mengacu kepada kelompok masyarakat yang berada dilapisan bawah yang karena posisinya itu seringkali menjadi korban dari dinamika pembangunan. Kelompok masyarakat itu menyandang kondisi yang serba lemah dan kekurangan dalam mutu dan taraf hidup, keterampilan, keswadayaan, dan sebagainya. Oleh karena itulah, mereka perlu diberdayakan.

Berdasarkan makna katanya, pemberdayaan atau empowement, diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari dalam yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari luar (Kartasmita 1996)

Menurut Sutoro Eko (Cholisin 2011) bahwa pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang, Pertama pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik diranah

negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, beternak, melakukan wirausaha atau kemampuan dan kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui lembaga pendidikan non formal. Pendidikan non formal merupakan pendidikan alternatif setelah pendidikan formal, kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan non formal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilan yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal.

Pendidikan non formal merupakan usaha masyarakat dalam mencari jalan keluar terhadap persoalan pendidikan formal yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Perhatian pendidikan non formal lebih terpusat pada usaha-usaha untuk membantu terwujudnya proses [pembelajaran dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 55 UU sisdiknas No. 20 tahun 2003 butir pertama yaitu, Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peranserta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan

pendidikan.masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Partisipasi masyarakat tersebut tercipta sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang bersumber dari masyarakat untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara kursus dan pendidikan atau instruktur kursus diberikan kebebasan dalam berorganisasi menjadi mitra pemerintah (Zam Zam Ali, 2012)

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu adalah melalui lembaga pendidikan non formal, dan salah satu lembaga pendidikan non formal tersebut adalah lembaga kursus. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebenarnya sudah lama memberikan berbagai bantuan kepada lembaga kursus untuk memberikan kursus gratis khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sebagaimana kabupaten lain, dikabupaten Purwakarta juga terdapat berbagai lembaga kursus yang tersebar disemua kecamatan. Namun berdasarkan studi awal yang dilakukan, peranan lembaga kursus untuk memberdayakan masyarakat khususnya melalui kursus gratis ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, berdasarkan hal tersebut maka perlu pengkajian secara mendalam berkaitan dengan hal tersebut.

3. Metode Penelitian

Setelah menentukan obyek penelitian, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) serta laporan dokumentasi.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu diperoleh pada lembaga tempat penelitian berdasarkan dokumentasi kepustakaan, literatur-literatur dan laporan lainnya sehubungan dengan peranan lembaga-lembaga kursus yang ada di daerah Purwakarta dan perkembangan tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif disamping dapat mengungkap dan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa riil dilapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi (hidden value) dari penelitian ini. Disamping itu penelitian ini juga peka terhadap informasi-informasi yang bersifatdeskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berada pada posisi sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985)

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, dari dua puluh Kecamatan kemudian dipilih empat kecamatan untuk dijadikan sampel wilayah. Berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat bahwa daerah Purwakarta terbagi atas dua kriteria yaitu daerah pinggir, dan daerah tengah (kota). Berdasarkan kriteria tersebut maka yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah kecamatan Purwakarta, Bungursari, Campaka dan Ciseureuh. Disamping itu pula dipilihnya lokasi tersebut karena lembaga kursusnya lebih banyak dan bervariasi jenis kursus yang dilaksanakannya.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi kata-kata atau cerita langsung dari para informan penelitian, tulisan dari berbagai dokumen yang dimiliki oleh lembaga kursus. Keterangan berupa kata-kata atau cerita langsung dari informan dijadikan sebagai data primer (utama) sedangkan tulisan atau data dari berbagai dokumen dijadikan data sekunder (pelengkap).

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama yang turun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknis analisis model interaktif (interaktive model of analysis) dari Miles dan Huberman. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification) (Miles dan Huberman 1992).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan dan Kursus Disdik Kabupaten Purwakarta yaitu Ibu Nurhayati bahwa dari berbagai jenis kursus tersebut. Lembaga-lembaga kursus yang ada di Kabupaten Purwakarta hanya melaksanakan tiga bidang kursus yaitu Komputer, Mengemudi dan Bahasa Inggris. Dari ketiga jenis kursus tersebut sebagian besar lembaga kursus melaksanakan kursus komputer. Banyaknya kursus komputer ini karena untuk saat ini jenis kursus itulah yang banyak diperlukan oleh warga Purwakarta dari semua kalangan. Secara rinci jenis kursus yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kursus yang ada di Kabupaten Purwakarta dapat terlihat pada tabel berikut :

No.	Nama Lembaga Kursus	Jenis Kursus	Alamat
1.	K T M English Consulting	Bahasa Inggris	K T M English Consulting Perum Dian Anyar Blok C3 No. 4&5, Ciseureuh Purwakarta
2.	ASTRACO Kursus Mengemudi	Mengemudi	Jl. Veteran Depan Kampus Polibisnis Purwakarta
3.	FELCOM	Komputer	Jl Raya Bungursari No. 21 Bunsari Purwakarta
4.	LPIA English Course	Bahasa Inggris	Jl. Taman Pahlawan Purwakarta
5.	LKP Insan Jaya Computer	Komputer	Jl. Sadang Subang RT 5 Kec. Campaka Purwakarta
6.	LKP Sejahtera Computer	Komputer	Jl Raya Sadang Ciwangi Purwakarta
7.	SMART English Course	Bahasa Inggris	Jl. Terusan Kapten Halim Simpang Purwakarta
8.	K T M English Consulting	Bahasa Inggris	J Veteran depan pondok pesantren Al Muhajirin Purwakarta
9.	Kharisma Course Center	Bahasa Inggris Komputer	Jl. Raya Sadang Purwakarta
10.	Iqro Computer	Komputer	Jl. Raya Bungursari Desa Bungursari

Salah seorang staff Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purwakarta yaitu Slamet mengatakan bahwa persyaratan untuk memperoleh izin kursus prosedur yang harus

dilaksanakan adalah pengelola kursus terlebih dahulu datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (P2KT) dikantor tersebut kemudian mengisi formulir dan melengkapi berbagai persyaratan. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- Ada program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum
- Ada jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya
- Adanya pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik)
- Adanya rencana sistem evaluasi dan sertifikasi
- Ada rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metode pembelajaran

Kemudian dijelaskan bahwa setelah pengisian formulir dan semua persyaratan dipenuhi, oleh staff KP2KT berkas tersebut kemudian diserahkan ke Disdik Kabupaten Purwakarta untuk diberikan rekomendasi.

Menurut kasi kelembagaan dan kursus Ibu Nurhayati bahwa sebelum memberikan rekomendasi, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap lembaga yang mengajukan izin kursus. Jika di anggap sudah layak baru kemudian diberikan rekomendasi. Setelah rekomendasi diberikan kemudian diserahkan kembali ke KP2K untuk selanjutnya dibuatkan izin kursus tersebut. Penetapan izin kursus ditetapkan oleh bupati atau melalui SKPD yang ditetapkan atas nama Bupati sesuai dengan Keputusan Bupati. Masa berlakunya izin kursus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Ibu Nurhayati menambahkan bahwa rekomendasi untuk memperoleh izin kursus diberikan terhadap lembaga yang sudah menjalankan kursusnya. Dengan kata lain jika ingin memperoleh izin kursus, maka lembaga tersebut harus menjalankan kursus terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat kesungguhan lembaga tersebut dalam menjalankan aktivitas kursusnya.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kursus di Kabupaten Purwakarta dalam memberdayakan masyarakat

Sebagaimana sudah dipaparkan pada bagian terdahulu bahwa jenis kursus yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta ini hanya mencakup tiga jenis kursus yaitu Komputer, mengemudi dan Bahasa Inggris. Walaupun demikian, upaya terhadap pemberdayaan masyarakat sudah terlihat, khususnya untuk jenis kursus komputer dan mengemudi.

Salah seorang pemilik kursus komputer yaitu Alfin Khaira (Alfin Komputer) mengatakan bahwa lembaga kursus yang didirikannya pada tahun 2007 ini sudah banyak menghasilkan lulusan, dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. LPK Alfin Komputer memasang tarif Rp. 300.000,- selama tiga bulan. Selanjutnya dijelaskan bahwa agar peserta kursus benar-benar menguasai keterampilan yang diajarkan, maka jika dalam jangka waktu tiga bulan ada peserta didik yang masih belum terampil, maka lembaga ini masih memberikan kesempatan untuk belajar tambahan dengan tidak dipungut biaya lagi. Dari alumni Alfin Komputer ini ada yang membuka jasa pengetikan, bekerja di staf administrasi perusahaan dan ada juga yang bekerja di staf administrasi desa.

Hal senada juga dikatakan oleh Makmur Rasyidi pengelola kursus Kharisma Group yang sudah membuka kursusnya sejak tahun 1995. Awal mulanya kursus ini didirikan oleh orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Makmur selanjutnya menjelaskan bahwa Kharisma group sudah banyak menghasilkan lulusan. Dari para lulusan tersebut banyak yang menggunakannya untuk bekerja diperusahaan-perusahaan khususnya perusahaan di Kawasan Bukit Indah City (B IC) Kabupaten Purwakarta.

Seperti diketahui bahwa banyak yang bekerja diperusahaan biasanya mereka tidak hanya mensyaratkan Ijazah tetapi juga ada keahlian tambahan lainnya, dan salah satunya adalah harus bisa komputer. Oleh karena itu banyak sekali lulusan-lulusan SLTA yang kursus di Kharisma Group ini disamping bekal untuk bekerja di perusahaan ada juga alumni yang menggunakannya untuk membuka usaha mandiri.

Pengelola Kharisma Group lainnya Ahmad Syidikul Madani mengatakan bahwa sejak berdiri sampai dengan sekarang LPK Kharisma Group sudah menghasilkan alumni lebih dari 1000 orang. Awal berdiri peserta kursus banyak yang sudah bekerja di instansi-instansi pemerintah. Mereka ikut kursus komputer karena tuntutan pekerjaan.

Pengelola kursus Kharisma Group selanjutnya menjelaskan bahwa sejak dua tahun terakhir lembaganya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan kursus gratis bagi masyarakat kurang mampu. Untuk tahun 2012, ada tiga program yang bisa di akses oleh lembaga kursus yaitu dana bantuan operasional program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), dana bantuan operasional program Desa Vokasi, dan dana bantuan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM). Bantuan kursus gratis ini tentu sangat membantu bagi warga yang kurang mampu. Antusias masyarakat dalam mengikuti kursus gratis ini cukup tinggi. Untuk mendapatkan dana bantuan dalam rangka melaksanakan program kursus gratis ini memang tidaklah mudah, karena harus bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya diseluruh provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga tidak semua lembaga kursus bisa mengakses dana bantuan operasional program kursus gratis ini, karena ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah :

1. Memiliki nomor induk lembaga (Nilek)
2. Diprioritaskan bagi lembaga yang nileknya sudah divalidasi atau terakreditasi BAN PNF atau telah dinilai kinerjanya.
3. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan disahkan oleh bank yang bersangkutan. Nama dan alamat lembaga harus sama dengan yang tercantum dalam buku rekening.
4. Memiliki NPWP atas nama lembaga
5. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten
6. Mempunyai akta pendirian lembaga.

Disamping persyaratan administrasi ada pula persyaratan teknis yaitu :

1. Memiliki struktur organisasi lembaga
2. Memiliki program kerja lembaga yang jelas

3. Berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan keterampilan yang diusulkan
4. Memiliki pendidik/instruktur sesuai bidang keterampilan yang diusulkan
5. Memiliki jaringan kemitraan
6. Mampu menyediakan sarana pembelajaran (teori dan praktek) dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan jenis keterampilan yang di usulkan
7. Sanggup membimbing dan melakukan pendampingan lulusannya untuk memperoleh pekerjaan atau merintis dan mengembangkan usaha.

Jika lembaga kursus sudah memenuhi persyaratan tadi maka lembaga bisa membuat dan mengajukan proposal ke dinas pendidikan propinsi. Proposal yang diajukan dilengkapi dengan :

1. Berkas (photo copy) persyaratan administrasi lembaga penyelenggara
2. Rekomendasi dari instansi terkait
3. Fakta integritas lembaga
4. Surat keterangan tanggung jawab mutlak
5. Surat kesanggupan menyelenggarakan program
6. Rencana dan program serta jadwal pelaksanaan pembelajaran
7. Profil lembaga penyelenggara

Tidak jauh beda dengan penjelasan pengelola kursus diatas pengelola kursus lainnya Slamet (pengelola Sapta Komputer) mengatakan bahwa sejak didirikan lembaga kursusnya sudah banyak menghasilkan banyak lulusan yang bekerja diberbagai bidang seperti tambang batu bara. Selain itu diantara mereka juga ada yang membuka jasa rental pengetikan. Sama halnya dengan Kharisma Group, Sapta Komputer juga pernah memperoleh dana bantuan program PKH. Dengan demikian sudah puluhan warga yang kurang mampu memperoleh kursus gratis di lembaga ini. Tujuannya tidak lain adalah agar warga mempunyai keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membangun daya,dengan mendorong, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta adanya upaya untuk mengembangkan kearah yang lebih baik. Secara umum dapat diterjemahkan suatu upaya untuk mengembangkan diri sendiri atau orang lain (kelompoknya) untuk berbuat lebih baik.

Pengelola kursus lainnya yaitu Syaiful Hadi yang mengelola LPK Sejahtera Komputer mengatakan bahwa lembaga yang dikelolanya pernah mengajukan usulan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk memperoleh bantuan dana dalam rangka melaksanakan kursus gratis. Kursus gratis diberikan dalam kaitannya dengan penambahan waktu. Dengan kata lain jika dalam waktu kursus yang ditentukan misalnya satu bulan tetapi peserta merasa masih belumterampil, maka yang bersangkutan diperbolehkan memperpanjang lagi waktu kursus tapi tanpa dibebani biaya kursus lagi.

Tidak jauh beda dengan yang dilakukan pengelola kursus Sejahtera Purwakarta pengelola kursus lainnya Ramzul yang mengelola Iqro Komputer yang beralamat di desa Bungursari kecamatan Bungursari, ia mengatakan lembaganya juga pernah mengajukan permohonan dana block grand ke Dinas Pendidikan Provinsi karena sifatnya berkompetisi lembaganya belum berhasil memperoleh dana bantuan tersebut. Namun demikian lembaganya juga memberikan keringanan biaya yakni dengan cara jika peserta kursus belum mahir dalam jangka waktu tiga bulan mereka boleh memperpanjang waktu kursus tanpa dibebani biaya tambahan.

Selain memberikan kursus gratis upaya lain yang dilakukannya adalah menyediakan jadwal pembelajaran yang sesuai dengan kesibukan peserta kursus. Hal ini ditempuh karena banyak warga masyarakat di Purwakarta yang ingin kursus tetapi terkadang berbenturan dengan pekerjaan lainnya. Misalnya jika ada peserta kursus yang bekerja dikebun pagi hari maka biasanya dia memilih jadwal sore atau malam hari.

Hal senada juga dikatakan oleh Novi Kurniawan yang membuka kursus dibidang mengemudi. Novi mengatakan bahwa peserta boleh memilih jadwal kursuskapan saja asal tidak berbenturan dengan peserta lain. Tidak semua warga yang mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kursus. Agar mereka tetap bisa mengikuti kursus maka upaya yang dilakukan oleh pengelola kursus adalah memberikan keringan biaya yakni dengan cara membayar biaya kursus dengan cara mencicil seperti halnya yang dilakukan LKP Sejahtera Komputer yang memasang tarif Rp.200.000,- yang ditempuh dalam 12 kali pertemuan. Namun peserta bisa mencicil biaya kursus tersebut sesuai dengan kemampuannya.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Deskripsi berbagai jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan memberdayakan masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kursus yang kemudian dilihat dari jenis kursus yang diselenggarakan di kabupaten Purwakarta ternyata hanya tiga jenis kursus yaitu Komputer, mengemudi dan bahasa Inggris.

Terbatasnya jenis kursus yang diselenggarakan diduga ada kaitanya dengan peraturan Daerah Kabupaten No. 12 Tahun 2009, dimana dalam Bab III pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah dan masyarakat (Diklusemas) yang meliputi :

1. Kursus Komputer
2. Kursus Tata Rias Wajah dan Rambut
3. Kursus Stir dan Montir Mobil
4. Kursus Elektronik
5. Kursus Bahasa Asing
6. Kursus Menjahit
7. Kursus Tata Boga

Berdasarkan ketentuan tersebut maka oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2KT) Kabupaten Purwakarta diartikan bahwa lembaga kursus yang bisa difasilitasi untuk memperoleh izin hanyalah jenis kursus sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pasal 5 ayat (3) tersebut. Padahal menurut Kemendikbud (2012) bahwa jenis keterampilan yang bisa diakses untuk memperoleh dana dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya yang kurang mampu ada 39 jenis keterampilan diantaranya tata busana, pembuatan hantaran, tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, Spa, akuntansi, pariwisata, Housekeeping, care giver, baby sitter, PLRT Plus, tata boga, pertanian, perkebunan, operator office, desain grafis, auto cad, perhotelan, teknisi otomotif, perikanan, peternakan, pertukangan, merangkai bunga, seni tari, seni ukir, melukis, dan tata rias pengantin. Jika dibandingkan dengan jenis kursus yang ada di Purwakarta maka tidak sampai 10 % yang bisa dilaksanakan.

Disamping itu terbatasnya jenis kursus

yang dilaksanakan diduga erat kaitanya dengan daya serap pasar karena bagaimanapun juga bahwa dalam membuka kursus harus memperhatikan apakah dibutuhkan masyarakat atau tidak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kemdiknas (2010) bahwa dalam membuka usaha baru adalah salah satu yang harus diperhitungkan adalah daya serap pasar.

4.2.2. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh lembaga kursus di Kabupaten Balangan dalam memberdayakan masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa pemberdayaan adalah untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kabupaten Purwakarta, berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga kursus. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan adalah memberikan pengurangan biaya kursus, memberikan pilihan waktu dalam mengikuti kursus, menambah waktu belajar bila belum terampil dengan tidak memungut biaya tambahan dan memberikan kursus secara gratis khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Semua itu dilakukan agar kelompok masyarakat dapat bangun dan melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Kartasasmita 1996) bahwa ada tiga arah yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menyediakan input (masukan) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat

masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

- c. Melindungi masyarakat yang lemah dalam proses pemberdayaan agar tidak menjadi semakin lemah oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Ketiga arah pemberdayaan masyarakat diatas berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu : (1) Melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan; (2) mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan (Sumadiningrat, 1997. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, pembangunan prasarana dasar, dan menciptakan keterkaitan desa kota yang harmonis dan terpadu. Hal ini terkait pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat. Dengan demikian setiap anggota masyarakat disyaratkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan yang sama dan bertindak rasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, memiliki kapasitas ekonomi, mandiri dan memiliki kemampuan untuk memiliki powers.

Upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga kursus yang ada di kabupaten Purwakarta sudah banyak membantu alumni untuk dapat bersaing dalam pasar kerja, beberapa diantaranya bahkan sudah bisa kerja di Industri yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Jenis kursus yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta masih terbatas dalam tiga jenis yaitu : bidang komputer, mengemudi dan Bahasa Inggris. Dari tiga jenis kursus tersebut yang paling banyak dilaksanakan adalah kursus komputer.

Lembaga kursus yang ada di Kabupaten Purwakarta sudah berperan dalam memberdayakan masyarakat di kabupaten Purwakarta. Hal ini terbukti dengan banyaknya

alumni yang sudah bisa memasuki peluang kerja di perusahaan-perusahaan, khususnya yang ada di wilayah Purwakarta.

5.2. Saran

1. Terbatasnya jenis kursus yang ada, diduga disebabkan oleh adanya Perda yang membatasi jenis-jenis kursus, oleh karena itu perlu ditinjau kembali isi dari Perda tersebut.
2. Instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan perlu melakukan pembinaan tata kelola administrasi secara continue terhadap lembaga kursus.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta hendaknya secara rutin melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan berbagai tawaran bantuan untuk lembaga kursus.

6. Referensi

- Arisah, 2009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa Artikel. Jurnal Wacana Volume 12 No. 2 April 2009
- Cholisin, 2011. Pemberdayaan Masyarakat, Atikel (Online) (<http://staff.uny.ac.id>) diakses 30 januari 2016
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang S item Pendidikan Nasional, depdiknas Jakarta
- Kartasasmita, Ginanj ar. 1996 Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT Purtaka Cidestindo, Jakarta
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Program Kecakapan Hidup. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Dirjen Pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Formal, Kemendikbud Jakarta
- Lincoln, Ys dan Guba, FG. 1985 Naturalistik Inquiry Beverly Hill Sage Publication
- Miles, MB dan Huberman Michael, 1992 Analisis Data Kuantitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi Universitas Indonesia Pers, Jakarta

- Setda Kabupaten Balangan 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat. Bagian Hukum Setda Purwakarta
- Soemadiningrat, Gunawan 1997 Membangun Perekonomian Rakyat, IDEA dan Pustaka Pelajar Jogjakarta
- Zam zam Ali, Muhammad 2012. Organisasi PNF harus mampu bersinergi dalam peningkatan Lembaga kursus dan pelatihan, Atikel (Online)

(http://hispi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&itemid=18)
diakses 28 Juli 2016

